



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 ini disusun dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dibuat sebagai perwujudan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

Kami menyadari dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengaharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dalam penyusunan LkjIP ini.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini diucapkan terima kasih, dan semoga LkjIP ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Batusangkar, Januari 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR,

Drs. ABRAR
NIP. 19621229 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	2
C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH	7
D. ISU STRATEGIS	16
E. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	39
A. VISI DAN MISI	19
B. TUJUAN DAN SASARAN	22
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
D. PERJANJIAN KINERJA UTAMA	24
E. RENCANA KINERJA TAHUNAN	24
F. PENETAPAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	29
B. REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV PENUTUP	41
A. KESIMPULAN	41
B. SARAN	41
LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ditetapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang terletak pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam memberikan pelayanan terutama pada bidang komunikasi dan informatika ditengah-tengah masyarakat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

LkjIP ini berupa wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun penyusunan LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi, visi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2016. Laporan LkjIP ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan LkjIP ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada satu tahun anggaran kepada publik atau pemangku kepentingan lainnya. Target yang akan dicapai pada

Dinas Komunikasi dan Informatika yakni merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Rencana kerja tahun 2018.

Pengukuran pencapaian akan kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta juga dapat sebagai bahan masukan dan juga sebagai umpan balik bagi pemangku kepentingan dalam rangka untuk meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara pemerintahan.

A. 1 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LkjIP ini adalah bentuk wujud sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian misi, visi dan tujuan .

Tujuan dari penyusunan LkjIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi dalam pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan kemudian akan dilakukan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang dihasilkan dari LkjIP dan ini dapat pula sebagai salah satu bahan dalam menetapkan kebijakan dan strategis yang akan datang sehingga dapat pula meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

A. 2 Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aspek terpenting dalam penguatan pembentukan suatu organisasi. Dalam sebuah organisasi sebagai faktor untuk pencapaian keberhasilan kinerja organisasi tersebut. Kelembagaan ini terangkum didalamnya aspek organisasi yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi dimaksud.

B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

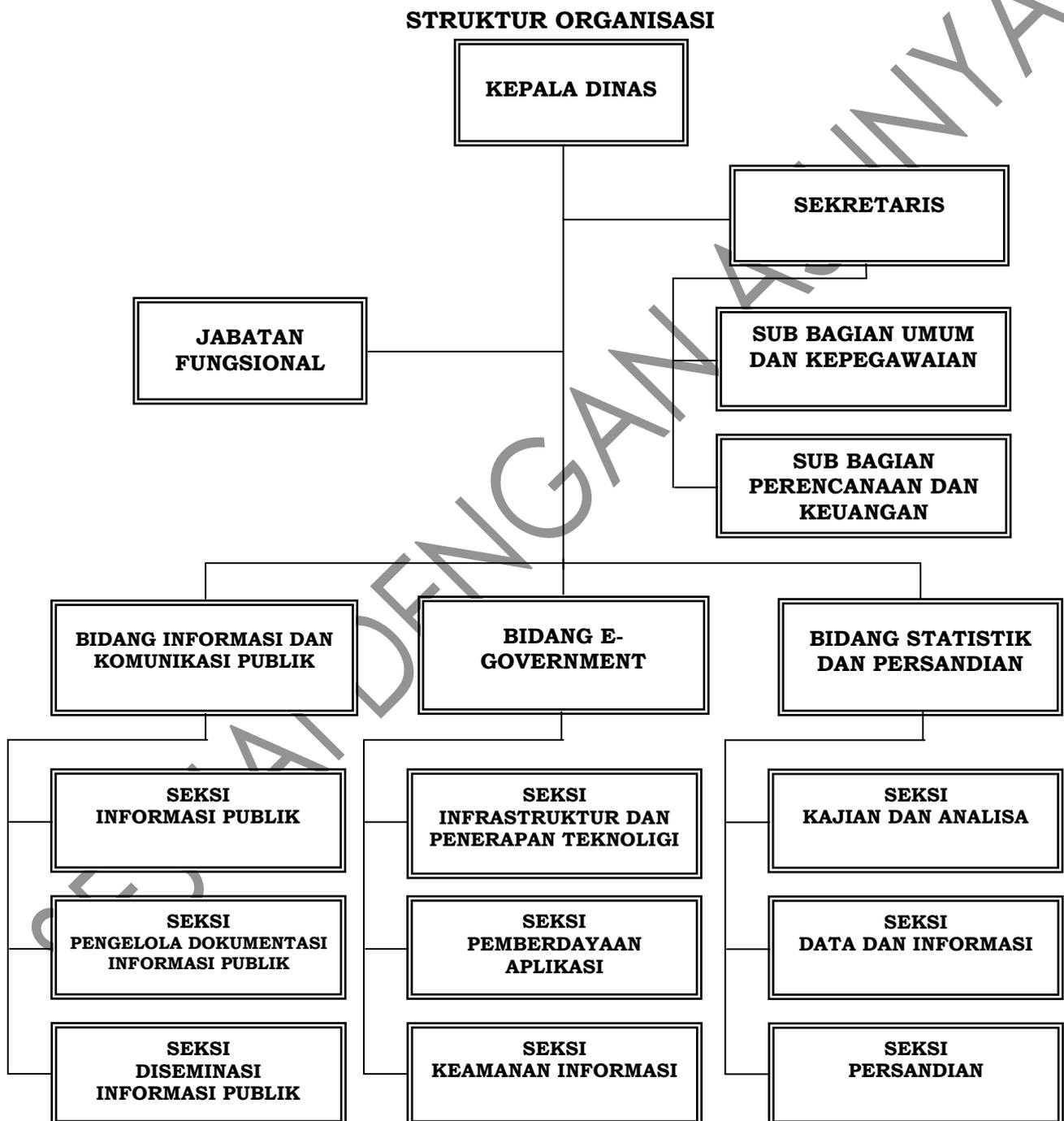
B. 1 Kewenangan

Adapun kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam urusan pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu

untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

B. 2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar:



B. 3 Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan *tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informaaika, bidang statistik dan bidang persandian yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang Informasi dan Komunikasi Publik, e-government, serta statistik dan persandian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Informasi dan Komunikasi Publik, e-government, serta statistik dan persandian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Informasi dan Komunikasi Publik, e-government, serta statistik dan persandian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi dengan uraian sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan propivinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city lingkup kabupaten, statistic dan persandian;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan dan pengembangan pengelolaan aplikasi aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan propivinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city lingkup kabupaten, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan dan pengembangan

pengelolaan aplikasi aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan propivinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city lingkup kabupaten, statistik dan persandian;

d. Pelaksanaan administrasi dinas;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala yang bertugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang tugas yang telah ditetapkan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat.
- (4) Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yang masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang memimpin pelaksanaan tugas masing-masing subbagian.
- (5) Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang.
- (6) Bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

TATA KERJA :

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1. Lingkungan Internal

a. Lokasi yang Strategis Tempat Bekerja

Dinas Komunikasi dan Informatika menempati gedung ex Badan Keuangan Daerah di Jl. Sultan Bagagarsyah, Pagaruyung. Jika dilihat dari lokasi kantor yang bertempat telah sesuai ditengah-tengah gedung perkantoran. Ini sangat strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Terdapat kekurangan pada kondisi gedung kantor yang tidak memadai untuk suatu gedung kantor Dinas Kominfo yang harus memuat ruang ICT Centre, ruang IT, ruang rapat, ruang tunggu, ruang konsultasi (klinik IT), ruang pustaka (baca), ruang

ibu menyusui, ruang dari masing masing bidang dll. Gedung kantor tersebut tidak/belum didukung oleh sarana dan prasarana.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) organisasi itu sendiri. Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan keadaan desember 2018 personil Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 13 Orang Pegawai Honorer/Kontrak dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1
Data Pegawai berdasarkan eselon

No	Uraian	Eselon				Jumlah
		Staf	IV	III	II	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	3	-	3
4.	Kasubag/Kasi	-	10	-	-	10
5.	Staf	24	-	-	-	23
6.	Penjaga malam	2				2
7.	Petugas K3	2				2
	Jumlah	28	10	4	1	44

Tabel 2
Data pegawai berdasarkan pembagian per Bidang.

NO	UNIT KERJA	PNS	HONORER	JUMLAH
1.	Sekretariat	9	4	13
2.	Bidang Informasi Komunikasi Publik	7	4	11
3.	Bidang E-Government	6	7	13
4.	Bidang Statistik dan Persandian	7	-	7
	Jumlah	29	15	44

Tabel 3
Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	HONOR	JUMLAH
1.	S-2	2	-	1
2.	S-1	16	5	22

3.	D-III	5	4	9
4.	D-I	-	2	2
4.	SMA sederajat	5	5	10
5.	SMP sederajat	-	-	-
6.	SD sederajat	-	-	-
	JUMLAH	28	8	44

Aset yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pada tabel berikut :

Tabel 4
Aset Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	4	Baik
2	Kendaraan Roda 2	3	Baik
		1	Rusak
3	Meja kerja pejabat	2	Baik
4	Meja rapat	1	Rusak
5	Lemari kayu	2	Rusak
6	Rak besi	2	Baik
7	Lap Top	4	Baik
		3	Rusak
8	Note Book	1	Baik
		2	Rusak
9	Komputer	15	Milik ICT center yg tdk dpt digunakan
		5	Rusak
10	Printer	10	Baik
		8	Baik
11	Kursi Rapat	5	Rusak
		15	Baik
12	Kursi Tamu	1	Baik
13	Kursi kerja	3	Baik
14	Kursi Besi/Metal	15	Baik
15	Meja komputer	15	Baik
16	Ac	8	Baik
17	TV	6	Baik
18	Filling Besi/Metal	2	Baik
19	Server	1	Baik
20	Scanner	2	Baik
21	Lemari Kayu	2	Baik
22	Rak Kayu	1	Baik
23	Hard Disk Eksternal	11	Baik

Dari uraian tersebut dapat di informasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk sumber daya manusia masih kurang termasuk sarana dan

prasarananya, hal ini akan kurang mendukung untuk mengoperasionalkan suatu organisasi perangkat daerah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan lain pendukung adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Sebelum terbentuk Peraturan Daerah No 09 tahun 2016 Tentang Nomenklatur, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang sebelumnya dilaksanakan pada 3 (tiga) instansi terdiri atas :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) untuk urusan Statistik.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (urusan Komunikasi dan Informatika).
3. Bagian Humas (urusan Komunikasi dan Informatika bidang urusan humas /protokoler).

Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Komunikasi Dan Informatika Meliputi :

- a. TELECENTER merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis TIK dalam rangka memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan murah.
- b. MENGINTEGRASIKAN LAYANAN E-GOVERNMENT, suatu strategi dalam Pemingkatan e-Government yang diwujudkan dalam kegiatan untuk

melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah yang tujuannya menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah adalah dengan:

1. Menyusun Masterplant E-Government.
2. Integrasi database dan layanan e-government.

Dalam layanan ini menghimpun semua aplikasi seperti e-planning, simda keuangan, e-monev dalam suatu satu aplikasi DASHBOARD. Dan direncanakan akan ditambahkan satu aplikasi ke dashboard yaitu aplikasi sistem kepegawaian.

- c. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE), dengan SIMAYA dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran berupa pemberian disposisi surat yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan system informasi.
- d. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING, direncanakan memberikan pelayanan teknis kepada SOPD Kabupaten Tanah Datar dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;
- e. KEAMANAN INFORMASI, untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001 : 2009
- f. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SOPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik;
- g. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi pembangunan khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.
- i. MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT (PERTURA) merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam suatu kelompok seni

pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat.

- k. Penyiaran LPPL RADIO LUHAK NAN TUO FM adalah bentuk sosialisasi program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang disampaikan dalam bentuk dialog interaktif di media siaran.
- l. BATUSANGKAR NEWSROOM (BNR) merupakan pusat atau dapur informasi yang memproduksi hasil liputan berupa berita aktual. Peran Newsroom sangat strategis, mengingat produk informasi yang dihasilkan menjadi penyeimbang berita media lainnya, sekaligus sebagai referensi bagi masyarakat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- m. MEDIA ON-LINE merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.tanahdatar.go.id;
- n. VIDEOTRON, sebagai salah satu media penyebarluasan informasi bagi masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui papan visual. Khalayak sasarannya masyarakat dan pengunjung Tanah Datar.
- o. BUPATI MENJAWAB, merupakan salah satu program unggulan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Program ajang interaktif antara Pemda dengan masyarakat telah dirintis sejak tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar melalui LPPL Radio Luhak Nan Tuo FM;
- a. FASILITASI KOMISI INFORMASI KABUPATEN (KIP),
KIP sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
- b. MEDIA CENTER, SEPERANGKAT Alat yang terdiri computer yang terhubung server di kementerian sebagai media integrasi informasi antara pemerintah kab/kota dengan kementerian Komunikasi dan Informatika.

- c. APT J3, program kerjasama kementerian kominfo dengan jepang salah satunya jaringan fiber optic yang mendukung system simda.
- d. M-Cap
M-CAP adalah fasilitas layanan bergerak yang memiliki fungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat, dengan menyediakan akses informasi dan pengetahuan berbasis internet yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- e. ICT Centre, Pusat pelayanan untuk melatih ASN dalam menggunakan aplikasi akses internet. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki ruang atau tempat untuk sarana dan prasarana aplikasi tersebut.
- f. MENARA, merupakan suatu sarana untuk perangkat telekomunikasi yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar memiliki 111 buah.

d. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pusat data center pada Daerah Kabupaten Tanah Datar tentu aja perlu dorongan *good will* dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mampu mengaplikasi TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK sebagai berikut :

TANTANGAN

Tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi public;
2. Kesenjangan informasi di masyarakat;
3. Pesatnya perkembangan TIK;
4. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata;
5. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap TIK;
6. Masih ada sebagian tupoksi Kominfo yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah;

7. Pengamanan jaringan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
8. Penyediaan data *statistic sektoral* sebagai acuan dalam pembangunan daerah;
9. Pengamanan Rahasia Negara, Informasi dan Data dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan tidak ada pengingkaran/pemalsuan.
10. Belum terintegrasinya database dan layanan *e-government* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten;
11. Masih belum didukungnya bidang persandian dengan aparatur dan sarana prasarana.

Tantangan ini merupakan isu strategis terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan menjawab ke depannya, untuk menentukan langkah Dinas Kominfo dalam menjawab tantangan tersebut.

- PELUANG

1. Tersedianya tahapan pembangunan sistem dan pengembangan aplikasi teknologi informasi (*Smart Regency*) dan *e-Government*;
2. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo;
3. Tersedia media informasi dan komunikasi;
4. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Kebutuhan pengembangan *e Government*;
6. Makin tinggi kesadaran masyarakat akan informasi dalam rangka keterbukaan informasi;
7. Meningkatkan kompetensi dan integrasi SDM IT;
8. Kebutuhan pengembangan TIK dalam menyelenggarakan pemerintahan ; dan
9. Tersedia Peraturan perundang-undangan yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

- ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 di dukung oleh anggaran yang bersumber dari DPPA tahun 2018 sebesar Rp.

5.931.970.000,-(Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

•	Pendapatan Asli Daerah	
12.	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 110.000.000,-
•	Belanja Tidak Langsung	
-	Belanja Pegawai	Rp. 2.256.587.300,-
•	Belanja Langsung	
-	Belanja Pegawai	Rp. 145.264.000,-
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.245.050.800,-
-	Belanja Modal	Rp. 395.067.900,-
	Jumlah keseluruhan	Rp. 5.931.970.000,-

- SARANA DAN PRASARANA

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan membangun fasilitas *Local Area Network (LAN)* di semua institusi Pemerintahan. LAN ini akan terhubung ke komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu instansi yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan saling bertukar informasi.

Untuk mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, social, politik dll maka beberapa tantangan yang harus diantisipasi dan diperhatikan sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi informasi belum diimbangi dengan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat pengguna dan antisipasi dampak negatifnya.
2. Semakin cepatnya arus informasi yang tersebar secara massif yang seringkali menyulitkan publik untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan tanggapan baik.
3. Masih terdapat beberapa nagari/jorong yang berada pada kawasan blankspot/tidak ada signal seluler dan jaringan telepon konvensional.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Diskominfo yang sesuai dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks.

5. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang mayoritas mengandalkan peran dunia usaha yang menyisakan blank spot di wilayah non konvensional;
6. Belum tersedianya sistem perencanaan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi (*Smart Regency*) dan *e-Government*.

e. Lingkungan Eksternal

Disamping lingkungan intern, ada hal yang sangat penting juga yaitu lingkungan ekstern mendukung suatu bentuk sistem pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar seperti :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Badan Keuangan Daerah
4. Inspektorat
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Satpol PP Damkar
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Perhubungan,
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Sosial
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15. Dinas PM Naker
16. Kantor Perpustakaan dan kearsipan
17. Dinas PERKIM- LH
18. RSUD
19. Dinas Pekerjaan Umum
20. Dinas KOPERINDAG
21. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. Dinas Pertanian
23. Dinas Pangan dan Perikanan
24. Badan PMDPPKB
25. Kantor Kesbangpol
26. Kecamatan se Kabupaten Tanah Datar
27. Nagari se- Kabupaten Tanah Datar
28. Instansi vertikal BPS

Keseluruhan opd, kecamatan dan nagari saling berkaitan erat terhadap Dinas Kominfo terutama terhadap jaringan dalam mengaplikasikan e simda, e monev, e, simduk, e simpeg dll.

f. Isu Strategis

Adapun isu–isu strategis dinas Kominfo berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau **E-government** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan erat dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal dalam menyampaikan pelayanan publik, atau menuju pemerintahan yang demokratis. Untuk saat ini belum tersedianya Sumber Daya Manusia Teknis Komunikasi dan informasi yang handal.
2. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.
3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi.
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.
7. Minimnya fasilitas infrastruktur sektor komunikasi dan informatika yang disediakan pemerintah daerah, tentunya akan menghambat pengembangan sektor-sektor lainnya.
8. Government Public Relation.
9. Tanah Datar Satu Data.

g. Sistematika Penulisan .

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018, LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan informasi umum tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menyajikan gambaran mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis) dalam rencana strategis (Rensta 2016–2021), rencana kerja tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja 2018 dengan capaian kinerja 2018. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan Program-Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2018.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Untuk memberikan arah dan pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Komunikasi dan Informatika dan mampu memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini perlu dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika. Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

A. VISI DAN MISI

Visi mengejawantahkan cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana arah Dinas Komunikasi dan Informatika dibawa dan berkarya untuk dapat tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsep visi di atas dan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai keinginan mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan upaya yang dituangkan dalam Rencana **Visi dan Misi Perangkat Daerah**.

Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan upaya yang dituangkan dalam Rencana Strategis ini.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Informasi berbasis Teknologi menuju Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera “

Masyarakat Informasi :

Mendiskripsikan sebuah masyarakat ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru

untuk mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan.

Terwujudnya *Masyarakat Informasi* berarti diharapkan terjadi perubahan signifikan perilaku masyarakat dari hanya menerima informasi menjadi aktif mencari informasi dan terlayannya seluruh lapisan masyarakat akan informasi dan fasilitas komunikasi yang berbasis elektronika sehingga akan menciptakan suatu masyarakat yang kaya akan informasi dan komunikatif dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, Dinas Komunikasi dan Informatika mengedepankan sikap profesionalisme dan melayani dengan sepenuh hati setiap kebutuhan masyarakat akan lancarnya sistem transportasi angkutan penumpang dan barang, sehingga terwujudnya keselamatan yang menggunakan sarana dan prasarana lalu lintas serta akses terakomodirnya fasilitas informasi bagi masyarakat.

Misi merepresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi, yang telah dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

-
1. *Meningkatkan Layanan Publik, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika yang berbasis teknologi dalam rangka mengoptimalkan layanan Pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi;*
 2. *Mewujudkan layanan komunikasi dan informatika secara jujur, benar, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mengembangkan kemitraan dan lembaga komunikasi dalam upaya penyebarluasan informasi dan kecukupan informasi publik.*
-

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.

Hal ini dimaksudkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar mampu mencapai tujuan dan sasarnya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran stratejik yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam jangka menengah (5 Tahun) adalah:

Tujuan:

1. Menuju Tanah Datar Smart Regency (Tanah Datar Diujung Jari)
2. Menuju Government Publik Relation (GPR)

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK;
2. Terkelolanya Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi sebagai pendukung pelayanan publik;
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi;
4. Meningkatnya informasi pemerintah lewat media;
5. Meningkatnya peran pemerintah dan Masyarakat dalam menyampaikan Informasi Publik;

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama ini sangat berarti bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mempedomani pengukuran kinerja yang akan digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Indikator Kinerja Utama ini juga berguna untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2016-2021.

Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Terkelola sistem informasi manajemen terintegrasi sebagai pendukung pelayanan publik	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Dihitung dari jumlah aplikasi yang terintegrasi
		Jumlah data dan informasi pengamanan	Dihitung dari jumlah OPD yang terfasilitasi pengamanan data pada aplikasi

2.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur teknologi	Tersedia jaringan TIK 39 OPD dan 75 nagari	Jumlah OPD dan Jumlah Nagari
		Persentase pengelolaan server oleh kominfo	$\frac{\text{Jumlah server yang dikelola kominfo}}{\text{Jumlah server yang ada}} \times 100\%$
		Tersedia data center	Dihitung dari ketersediaan data center Kabupaten Tanah Datar
3.	Meningkatnya informasi pemerintah lewat media	Jumlah informasi pemerintah melalui media	Dihitung dari jenis media yang dimanfaatkan
4.	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi publik	Tersedia jenis layanan informasi publik	Diukur dari ketersediaan jenis/lembaga yang dimanfaatkan untuk perumusan kebutuhan informasi publik

Rumusan sasaran yang digunakan dalam penyusunan LkjIP ini adalah sasaran pada Renstra 2016-2021 yang merupakan prioritas dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika. Target kinerja yang hendak dicapai mulai tahun 2016 s.d 2021 terkait dengan sasaran satu dari tujuan satu adalah jumlah aplikasi yang terintegrasi sebanyak 18 Aplikasi, Untuk tahun 2018 target dimaksud sudah mencapai 8 (Delapan) aplikasi.

Sasaran satu pada tujuan dua adalah persentase penyediaan data dan informasi. Jumlah system informasi yang diperbaiki dibagi dengan system informasi yang tersedia.

Sasaran dua tujuan satu adalah tersedianya jaringan TIK terhadap OPD dan Nagari.

Sasaran dua tujuan dua adalah Jumlah data dan informasi pengamanan dengan dihitung dari jumlah OPD yang terfasilitasi pengamanan data pada aplikasi sebanyak 39 OPD.

Sasaran dua tujuan tiga adalah Tersedianya data center dengan menghitung jumlah data center yang ada.

Sasaran tiga tujuan satu jumlah informasi pemerintah melalui media dengan cara menghitung dari jumlah jenis media yang dimanfaatkan ada 4 jenis media.

Sasaran empat tujuan satu Persentase pengelolaan server oleh kominfo, dihitung dengan cara diukur dari ketersediaan jenis/lembaga yang dimanfaatkan untuk perumusan kebutuhan informasi publik sebanyak 3 jenis

lembaga yaitu Tim Satgas (satuan petugas) informasi, Tim PPID dan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).

D. PERJANJIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Dalam rangka mencapai sasaran yang prioritas diperlukan upaya dan langkah-langkah yang strategis. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Rencana kerja ini merupakan bagian dari satu kesatuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2018. Untuk mendukung kegiatan program pembangunan dalam rencana kerja telah dialokasikan pembiayaannya melalui rencana kerja dan anggaran tahun 2018. Rencana kerja dalam tahun 2018 yang berisi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan merupakan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara nomor nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun perjanjian kinerja untuk anggaran tahun 2019 (perjanjian kinerja terlampir).

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018

Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir tahun periode pelaksanaan.

Lanjutan dari Rencana Kinerja 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2019 antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Tanah Datar. Indikator kinerja dan target kinerja disajikan pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.2
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN TANAH DATAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelola sistem informasi manajemen terintegrasi sebagai pendukung pelayanan publik	Tersedianya Aplikasi yang terintegrasi	8 aplikasi
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur teknologi	Jumlah data dan informasi pengamanan	39 OPD
2		Tersedianya jaringan TIK 39 OPD dan 75 nagari	39 OPD dan 75 Nagari
3	Meningkatnya informasi pemerintah lewat media	Tersedianya server induk 1 paket	1 Server
3		Tersedia data center 1 Paket	1 Unit data center
3		Tersedianya informasi pemerintah melalui media	a. Media Massa (Koran,tv, radio) b. Media luar ruangan (baliho, spanduk, billboard, videotron) c. media khusus (stiker, leaflet, poster) d. media terbarukan (twitter, facebook, instagram, website)
4	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi publik	Tersedia jenis layanan informasi publik	SATGAS, Jumlah KIM dan PPID

F. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja akhir tahun 2018.

Berikut perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018, indikator kinerja dan target kinerja disajikan pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.3
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pendukung pelayanan publik	Fasilitas sarana prasarana pelayanan publik	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418.119.300
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan listrik	150.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.000.000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	52.761.900
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.310.400
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	14.547.000
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	93.000.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	261.147.000
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	72.200.000

				Pemeliharaan rutin berkala/gedung kantor	43.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	120.947.000
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000
2	Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Jumlah pelaksanaan pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika	30 ASN	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	47.000.000
				Pendidikan Pelatihan Formal	47.000.000
	Terkelolanya sitem informasi manajemen yang terintegrasi sebagai pendukung pelayanan publik	Tersedianya Aplikasi yang terintegrasi	8 Aplikasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	311.436.000
				Pengelolaan Aplikasi Elektronik	311.436.000
		Terselenggaranya Keamanan data dan informasi	39 OPD	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian	53.396.000
				Pembinaan dan Pengembangan Persandian	53.396.000
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur teknologi	Tersedianya jaringan TIK 39 OPD dan 75 Nagari	39 OPD dan 75 Nagari	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	987.640.000
				Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	987.640.000
		Tersedianya server induk 1 paket	1 Server		
				Program Perencanaan pembangunan bidang statistik	65.014.000
		Tersedianya data center 1 paket	1 Unit	Koordinasi perencanaan bidang statistik	65.014.000
	Meningkatnya informasi pemerintah lewat media		Media massa (koran, tv, radio)	Program kerjasama informasi dengan mas media	669.795.900
		Tersedianya informasi pemerintah melalui media	Media luar ruangan (baliho, spanduk, billboard, videotron) Media Khusus	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	540.220.000

			(stiker, leaflet, poster) Media terbarukan (twitter, facebook, instagram, website)		
				Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	129.575.900
	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi publik	Tersedia jenis layanan informasi publik	SATGAS, jumlah KIM dan PPID	Program kerjasama informasi dengan mas media	302.287.000
				Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	232.287.000
				Pembinaan dan pengelolaan media informasi	70.000.000
				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	238.565.000
				Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	238.565.000



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penghitungan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai instansi di akhir tahun anggaran pada tingkat indikator hasil (outcome). Selanjutnya terhadap capaian kinerja sasaran yang tidak memenuhi target rencana yang telah ditetapkan dilakukan analisa sesuai kondisi makro dan asumsi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkompeten terhadap laporan ini dapat memahami secara utuh berbagai kelemahan dan kekuatan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan misinya guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur penghematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan.
2. Tingkat capaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan fomulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan serta

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam mengukur nilai capaian Kinerja terhadap masing-masing kinerja kegiatan, dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi setiap indikator kinerja (*in put, out put, dan out come*). Sementara untuk pengukuran kinerja, terutama keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran dan keberhasilan yang dicapai organisasi, digunakan skala pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
Diatas 100	Sangat memuaskan
85 – 100	Sangat baik
70 – 85	Baik
55 – 70	Sedang
0 – 55	Kurang baik

Kriteria penilaian di atas, digunakan sebagai standar penilaian tingkat capaian baik indikator kinerja keluaran (*out put*), hasil (*out come*), kegiatan/sasaran maupun kinerja Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 ada 3 sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 9 (Sembilan) Program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 3.784.102.700,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus dua ribu tujuh ratus rupiah)**. Setelah dilakukan analisa pencapaian kinerja sasaran secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan dengan nilai sangat dan dengan capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 89,39 %. Analisa capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terkelolanya sistem informasi manajemen yang terintegrasi sebagai pendukung pelayanan publik

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	0	6	8	6	8	100%	100%
2	Terselenggaranya keamanan data dan informasi	0	0	1	0	1	100%	100%
Rata-rata per sasaran							0	100%

Sasaran terkelolanya sistem informasi manajemen yang terintegrasi sebagai pendukung pelayanan public, diukur dengan dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah aplikasi yang terintegrasi, Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa dengan kegiatan Pengelolaan aplikasi elektronik, anggaran sebesar Rp. 311.436.000,- teralisasi Rp.295.305.475,- (94,82 %).

Capaian untuk indicator ini terlaksananya sesuai target sebanyak 8 (delapan) aplikasi yang terintegrasi yang merupakan akumulasi dari target tahun sebelumnya.

Aplikasi yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu :

1. Aplikasi E-MONEV, untuk monitoring realisasi keuangan dan fisik kegiatan.
2. Aplikasi Dashboard, untuk menampilkan informasi berkaitan dengan perencanaan, anggaran dan pelaporan (monitoring dan evaluasi).
3. Aplikasi Simpeg, untuk manajemen administrasi kepegawaian.
4. Aplikasi TPP, untuk pengelolaan tambahan penghasilan pegawai.
5. Aplikasi Kinerja, khusus menampilkan informasi kinerja pejabat eselon II.
6. Aplikasi Simpeldukcapil, untuk digitalisasi pelayanan pada Dinas Dukcapil.
7. Aplikasi SAPEK, untuk manajemen administrasi perkantoran secara elektronik.
8. Aplikasi Siana, untuk administrasi dan informasi pada nagari.

2. Terselenggaranya keamanan data dan informasi, Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian dengan

kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Persandian, anggaran sebesar Rp. 53.396.000,- realisasi Rp.44.857.500,- (84%).

Indikator ini melaksanakan tentang terselenggaranya keamanan data dan informasi. Tahun anggaran 2018 terdapat 1 (satu) aplikasi yang terganggu keamanannya yaitu website Tanah Datar, telah dapat di perbaiki dan informasi telah dapat diterima maupun disampaikan melalui website. Sementara tahun 2017 tidak ada aplikasi yang bermasalah.

Selain hal tersebut kegiatan ini juga melaksanakan sosialisasi tentang **Sertifikat dan tanda tangan digital Elektronik serta ciber security** tanggal 30 Agustus 2018 dengan peserta 120 orang diikuti oleh seluruh kepala OPD, BUMN, BUMD, Instansi vertical. Narasumber dari Badan Siber Sertifikat Nasional (BSSN).

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Tersedia jaringan TIK 39 OPD dan 75 Nagari	0	39 75	39 75	39 75	39 75	100 100	100 100
2	Persentase pengelolaan server oleh Kominfo	0	75%	80%	75%	80%	100	100
3	Tersedia data center	0	1	1	1	1	100	100
Rata-rata per sasaran							0	100%

Sasaran ini diukur dengan dengan 3 (tiga) indikator terdiri atas :

- a. Tersedia jaringan TIK 39 OPD dan 75 Nagari, artinya Dinas Kominfo memfasilitasi setiap jaringan yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan menyiapkan jaringan yang akan dimanfaatkan oleh OPD dan nagari dalam menggunakan aplikasi sebagai pendukung pelaksanaan tupoksi. Indikator ini dituangkan ke dalam kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

- b. Persentase pengelolaan server oleh Kominfo, indikator ini untuk sementara tidak dipisahkan pelaksanaannya dalam kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Hal ini terkait dengan keterbatasan dalam anggaran namun pelaksanaan tugas telah dapat dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan capaian indikator telah tercapai 100%.

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Jumlah dana Rp. 987.640.000,- realisasi sebesar Rp. 953.758.891,- (96,57%).

Kegiatan dilaksanakan berupa pemeliharaan jaringan fiber optic, radio wireles antar tower di Perangkat Daerah se Kabupaten Tanah Datar. Tersedianya infrastruktur jaringan komputer untuk aplikasi SIMDA (keuangan dan aset), SIMGaji, yang menghubungkan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Terpeliharanya peralatan komputer sebagai sarana penunjang kerja.

Hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, adalah :

1. Penyediaan jaringan fiber optik/metro-e pada Perangkat Daerah se Kabupaten Tanah Datar sebanyak 39 OPD/ 39 lokasi dan berlangganan internet Astinet. Dengan penyediaan jaringan fiber optic dan penyediaan akses internet tersebut hasilnya antara lain:
 - a. Agar 39 OPD termasuk kecamatan dapat terintegrasi ke Kabupaten dalam jaringan fiber optic sehingga akan memudahkan setiap OPD (operator masing-masing OPD) melakukan koneksi ke server/aplikasi yang ada di Kabupaten seperti server/aplikasi SIMDA, E-Planning, E-Monev, LPSE dan lainnya.
 - b. Memenuhi kebutuhan internet OPD terutama Kantor Camat se Kabupaten Tanah Datar sampai ke beberapa nagari seperti penggunaan website dan jaringan simda, dan penggunaan email masing-masing OPD.
2. Penyediaan akses internet gratis (free-Wifi) pada tiga lokasi (lapangan Cindua Mato Batusangkar, halaman Istano Basa Pagaruyung dan Taman Pagaruyung).

3. Tersedianya peralatan jaringan dan komputer dengan rincian:

- a. Router : 11 buah
- b. UPS : 1 buah
- c. Server : 1 buah
- d. Laptop : 2 buah
- e. Stabilizer: 1 buah

Dengan tersedianya jaringan fiber optik metro-e dan akses internet diharapkan operator komputer setiap OPD tidak perlu datang ke Kabupaten (ke Batusangkar) untuk melakukan entri data (koneksi) ke server, seperti koneksi ke server/aplikasi SIMDA Keuangan, E-Planning, E-Monev, LPSE dan lainnya.

- c. Tersedia data center, indikator ini bertujuan untuk menghimpun dan menyimpan data pembangunan di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Data ini bermanfaat bagi OPD, nagari maupun masyarakat yang membutuhkan. Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengembangan data/informasi/statistic dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistic, dengan capaian indikator 100%.

Bentuk kegiatan melaksanakan survey social ekonomi daerah (SUSEDA) tahun 2018 dengan kerjasama BPS Kabupaten Tanah Datar dengan Perjanjian kerjasama nomor SPK. 070/027/PK/Kominfo 2018 dan nomor 003/BPS1305/PKS/04/2018. Hasil kerjasama berupa 1 paket *RAW DATA* yang terdiri dari :

1. Raw Data Rumah tangga sample sebanyak 1138 RT
2. Raw Data rumah tangga sample sebanyak 4101 anggota rumah tangga
3. Data set mikro data rumah tangga sample dengan weighting sebanyak data susenas 2018, 1733 RT
4. Tabulasi statistic kesejahteraan rakyat hasil suseda

Data tersebut sebagai bahan data Suseda Kabupaten Tanah Datar dan telah dapat diinformasikan kepada OPD dan masyarakat.

Jumlah dana Rp.404.702.500,- terealisasi Rp. 401.108.000,- (99,11%).

2. Kegiatan Koordinasi Data Statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupa Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah melalui aplikasi e-book, dapat diakses melalui ***playstore e booktanahdatar***

Jumlah dana Rp. 65.014.000,- realisasi sebesar Rp 63.164.000,- (97,16%)

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Informasi pemerintah lewat media

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Tersedianya informasi pemerintah melalui Publik	0	4	4	4	4	100	100
Rata-rata per sasaran							0	100%

Sasaran ini diukur dengan dengan indikator peningkatan Program Kerjasama informasi dengan mas media.

Indikator ini menyampaikan informasi public atau layanan informasi melalui 4 (empat) jenis media sebagai berikut :

1. Media Massa seperti TV, Koran dan Radio
2. Media Luar ruangan seperti Baliho, spanduk, billboard dan video tron
3. Media Khusus seperti stiker, leaflet dan poster.
4. Media Terbarukan seperti Media social terdiri atas Facebook, twiter, Instagram dan website.

Program pendukung indicator ini adalah Kerjasama informasi dengan mas media.

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Pada Indikator ini dengan kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah terlaksana capaiannya dengan pengadaan baliho dan spanduk.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini telah banyak informasi pembangunan dari Perangkat Daerah dan jajaran instansi vertical yang disampaikan melalui videotron. Penyampaian informasi pada baliho terutama dalam rangka memperingati hari hari besar nasional, agama dan pelaksanaan

kegiatan pemerintah daerah seperti festival budaya minangkabau, TDS, peresmian rumah tenun di Lintau oleh Ibu mufidah. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pengadaan tiang baliho, pengadaan triport, pengadaan neon box dan pengadaan speaker. Anggaran Rp. 540.220.000.- realisasi Rp.446.598.460,- (82,66%).

b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian kinerja untuk indicator ini berupa media Jumlah dana Rp. 232.287.000- realisasi sebesar Rp. 200.460.392,- (86,29%).

Hasil yang telah dicapai dengan terlaksananya kegiatan ini antara lain radio Luhak Nan Tuo 102,5 FM, mengudara atau melaksanakan siaran yang berlangsung selama 19 jam setiap harinya mulai pukul 05.00 Wib s/d 00.00 wib. Program radio yang disampaikan menarik dan informasi yang disampaikan berupa informasi pembangunan daerah, berita terkini, bahasa Inggris, hiburan untuk masyarakat dll. Jasa pengembangan jaringan telah dilaksanakan seperti jasa live streaming Radio Luhak Nan Tuo pada Play Store, sehingga siaran langsung pada Radio Pemda Tanah Datar dapat didengar melalui internet dimana saja. Pelaksanaan Liputan Penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebanyak 30 kali dialog interaktif yang terjadwal secara tetap bersama MUI dalam program Mui menjawab, Sehat bersama IDI dan Pembinaan Rumah Tahfizd. penyiaran siaran langsung kegiatan pembelajaran di TK dan PAUD dalam program Bintang kecil. Penyelenggaraan Dialog Interaktif tentang event event daerah. Pelaksanaan pemeliharaan alat alat studio meliputi perbaikan Reciver pemancar dll.

c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

Kegiatan Kerjasama Publikasi media Online dengan lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Sumatera Barat. Telah terlaksana berita yang dipublikasikan sebanyak 25 berita per bulan dengan jumlah total 150 berita. Jenis berita yang dipublikasikan antara lain informasi Pembangunan Daerah dan Nasional. Jumlah Publikasi melalui media luar ruangan sebanyak 20 buah spanduk dan 3 buah Baliho. Informasi melalui himbuan stiker sebanyak 990 lembar tentang promosi "*Radio LPPL Luhak Nan tuo*", dan

brosur sebanyak 1000 lembar tentang “*Waspada terhadap kejahatan internet banking*”.

Telah dilaksanakan sosialisasi untuk pembinaan dalam rangka peningkatan peranan Masyarakat dalam menyebarluaskan Informasi melalui Media Tradisional dengan pembinaan Sanggar seni yang ada di Kabupaten Tanah Datar untuk dipotensikan sebagai Media Tradisional. Jumlah dana Rp. 129.575.900,- realisasi sebesar Rp. 98.728.800,- (76,19%)

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menyampaikan Informasi Publik

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Tersedianya jenis layanan informasi publik	0	3	3	3	3	100	100
Rata-rata per sasaran							0	100%

Program mendukung capaian kinerja adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

Hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Tim Satgas Penyebarluasan Informasi Publik, terdiri dari 52 orang dan pembayaran honor satgas.
- b. Sosialisasi Jurnalistik/wartawan se Kabupaten Tanah Datar sebanyak 50 orang wartawan, 4 orang humas unsure Muspida (Polres, Kejari, Kodim, Kemenag), Humas dan Diskominfo sebanyak 6 orang. Kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari ke Propinsi Riau.

Jumlah dana Rp. 238.565.000,- realisasi sebesar Rp. 226.921.500,- (95,11%). Indikator ini terlaksana dengan baik dengan capaian 100%, dengan pembentukan SATGAS.

2. Pembinaan dan pengelolaan media informasi.

Jumlah dana Rp. 70.000.000,- realisasi sebesar Rp. 55.017.150,- (78,59%). Secara umum kegiatan terlaksana dengan baik, namun serapan anggaran masih kurang karena anggaran direncanakan untuk persiapan lomba KIM tingkat propinsi Sumatera Barat, namun gagal pada tahap penyisihan. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan pembinaan untuk media tradisional terutama media Kelompok Informasi Masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

NO.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		2018	2018	(%)
1	3	4	5	6
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	418.119.300	351.432.095	84,05
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	100.707.491	67,14
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	13.000.000	4.989.150	38,37
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.761.900	52.362.325	99,24
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	49.995.000	99,99
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.310.000	31.159.000	99,51
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.963.000	99,26
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	6.661.000	95,15
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	16.647.000	6.490.600	44,61
	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan	93.000.000	92.604.529	99,57

	Konsultasi Ke Luar Daerah			
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	261.147.000	256.972.694	94,40
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	72.200.000	70.526.027	97,68
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	43.000.000	43.000.000	100,00
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	120.947.000	120.587.267	99,70
	4 Pemeliharaan rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000	22.859.400	91,43
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.000.000	46.888.000	99.76
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	47.000.000	46.888.000	99.76
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	25.000.000	23.262.200	93,04
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.854.400	97,08
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	9.493.400	94,93
	3 Penyusunan Perencanaan Tahunan	10.000.000	8.914.400	89,14
V	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian	53.396.000	44.857.500	84,00
	1 Pembinaan dan Pengembangan Persandian	53.396.000	44.857.500	84,00
VI	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	404.702.5000	401.108.000	99,11
	1 Pengelolaan, updating, dan analisis data dan data statistic daerah	404.702.500	401.108.000	99,11

VII	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.607.641.000	1.531.003.016	95,23
	1 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	987.640.000	953.758.891	96,57
	2 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	238.565.000	226.921.500	95,11
	3 Pembinaan dan pengelolaan media informasi	70.000.000	55.017.150	78,59
	4 Pengelolaan aplikasi elektronik	311.436.000	295.305.475	94,82
VIII	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	902.082.900	745.787.652	82,67
	1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	540.220.000	446.598.460	82,66
	2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	232.287.000	200.460.392	86,29
	3 Penyebarluasan informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat	129.575.900	98.728.800	76,19
IX	Program Perencanaan Pembangunan bidang Statistik	65.014.000	51.327.290	93,32
	1 Koordinasi perencanaan bidang statistik	65.014.000	63.164.000	97,16
	JUMLAH	3.784.102.700	3.449.049.623	89,39%

BAB IV
PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari hasil penjelasan pada bab-bab terdahulu, selanjutnya dapat disusun butir-butir kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016, dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas : *“melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika., Statistik dan Persandian”*.
2. Dari 9 (sembilan) Program yang terdiri atas 28 (dua puluh delapan) Kegiatan yang ditetapkan untuk tahun 2018 sesuai dengan Rencana Strategik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar 2016-2021 telah dapat dilaksanakan dengan baik
3. Dari pengukuran kinerja, terutama keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Capaian Sasaran 1 : Sangat Baik
 - b. Capaian Sasaran 2 : Sangat Baik
 - c. Capaian Sasaran 3 : Sangat Baik
 - d. Capaian Sasaran 4 : Sangat Baik

B. SARAN

Berdasarkan butir-butir kesimpulan diatas, selanjutnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rentra SKPD dimasa mendatang hendaknya tetap menjaga prinsip-prinsip *efektif, efisien dan ekonomis* mulai dari *perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian*.
2. Diharapkan semua rencana terhadap program dan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagai sarana mutlak untuk pendukung capaian indikator Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Perlu adanya penajaman penetapan output dan outcome yang terukur dan secara rasional dapat dicapai pada tahun pelaksanaan kegiatan sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat diukur tingkat keberhasilannya.
4. Memperhatikan sinkronisasi dari indikator-indikator output dan outcome dari Renstra, Renja, RKA dan DPA dari setiap program/kegiatan.
5. Terhadap program dan kegiatan walaupun secara output telah tercapai 100 %, namun secara outcome (hasil), keefektifitasnya dipaparkan perlu dikaji kembali dalam bentuk survey atau pengukuran kinerja terhadap manfaat program. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat program dan kegiatan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, motivasi kerja aparatur, kualitas pelayanan publik, terutama bagi program dan kegiatan yang sifatnya sangat strategis.
6. Untuk menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terpaksa ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya, maka perlu adanya penajaman program dan kegiatan yang dipersiapkan secara matang dan siap untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1	Terkelolanya Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi sebagai Pendukung Pelayanan Publik	Jumlah Aplikasi Terintegrasi	8 aplikasi	8 aplikasi	100
		Terselenggaranya keamanan data dan informasi	80 %	80%	100
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur teknologi	Tersedianya jaringan TIK 39 OPD dan 75 Nagari	39 OPD & 75 nagari	39 OPD & 75 nagari	100
		Persentase pengelolaan server oleh Kominfo	1	1	100
		Tersedia data center	1	1	100
3	Meningkatnya informasi pemerintah lewat media	Jumlah informasi pemerintah melalui media	4 jenis media	4 jenis media	100
4	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi publik	Tersedia jenis layanan informasi publik	3 jenis informasi	3 jenis informasi	100